



KORAN	HAL
Haluan	10
Padang Ekspres	
Singgalang	
Pos Metro	

Tanggal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

## JELANG PEMERIKSAAN LKPD

# BPK Temui Plt Wali Kota Padang

**PADANG, HALUAN**—Rombongan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bertemu Plt Wali Kota Padang Hendri Septa, Selasa (9/3), di rumah dinas wali kota untuk menindak lanjuti LKPD Pemko Padang TA 2020 yang baru-baru ini diserahkan

Pengendali Teknis Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Cahyadi Anjar Nugraha, mengatakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan Perundang-undangan, selama 60 hari pasca diserahkan LKPD, BPK pun harus menyelesaikan audit terhadap LKPD yang diserahkan.

“Maka itu, sebelum memulai pemeriksaan kita terlebih dahulu meminta izin dan rekomendasi dari Plt Wali Kota Padang. Pemeriksaan yang dilakukan secara umum adalah untuk memeriksa apakah LKPD yang dilaporkan Pemko Padang sudah sesuai dengan standar akuntansi atau belum. Begitu juga penggunaan dananya apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita berharap, Pemko Padang dapat mendukung pelaksanaan audit yang kita lakukan,”ujarnya.

Sementara itu, Plt Wali Kota Padang Hendri Septa menyampaikan atas nama Pemerintah Kota Padang mengucapkan terima kasih

kepada BPK-RI Perwakilan Sumbar yang akan melakukan audit terhadap LKPD Pemko Padang TA 2020.

Ia pun berharap dan mengimbau kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para aparatur pengelola keuangan di jajaran Pemko Padang, untuk menyiapkan semua bentuk dokumen pertanggungjawaban yang diminta dalam rangka mendukung pelaksanaan audit yang dilakukan oleh tim audit BPK-RI Perwakilan Sumbar.

“Besarnya harapan kita semoga pelaksanaan audit oleh BPK-RI Perwakilan Sumbar tersebut berjalan dengan lancar dan suk-

ses,”ujarnya.

Plt Wako pun berharap pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Pemko Padang TA 2020 tersebut, Kota Padang kembali meraih dan mempertahankan prediket Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Beberapa tahun terakhir Kota Padang telah 7 kali menerimanya dengan 6 kali diraih secara berturut-turut. Semoga kita mampu mempertahankannya. Karena memang, kita ingin menjadikan Pemko Padang ini sebagai pemerintah daerah yang baik (*good governance*), transparan dan akuntabel tentunya,” ujar Hendri Septa. (h/mg-fdi)